



Kementerian PPN/
Bappenas

Agenda dan Isu Strategis Keterbukaan Informasi Publik dalam RPJMN 2025-2029

Nuzula Anggeraini
Plt. Direktur Politik dan Komunikasi

Jakarta, 3 Juli 2024

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI



Kerangka Paparan



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

RANCANGAN AKHIR RPJPN TAHUN 2025-2045

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL RANCANGAN RKP TAHUN 2025



Keterbukaan Informasi Publik



Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan

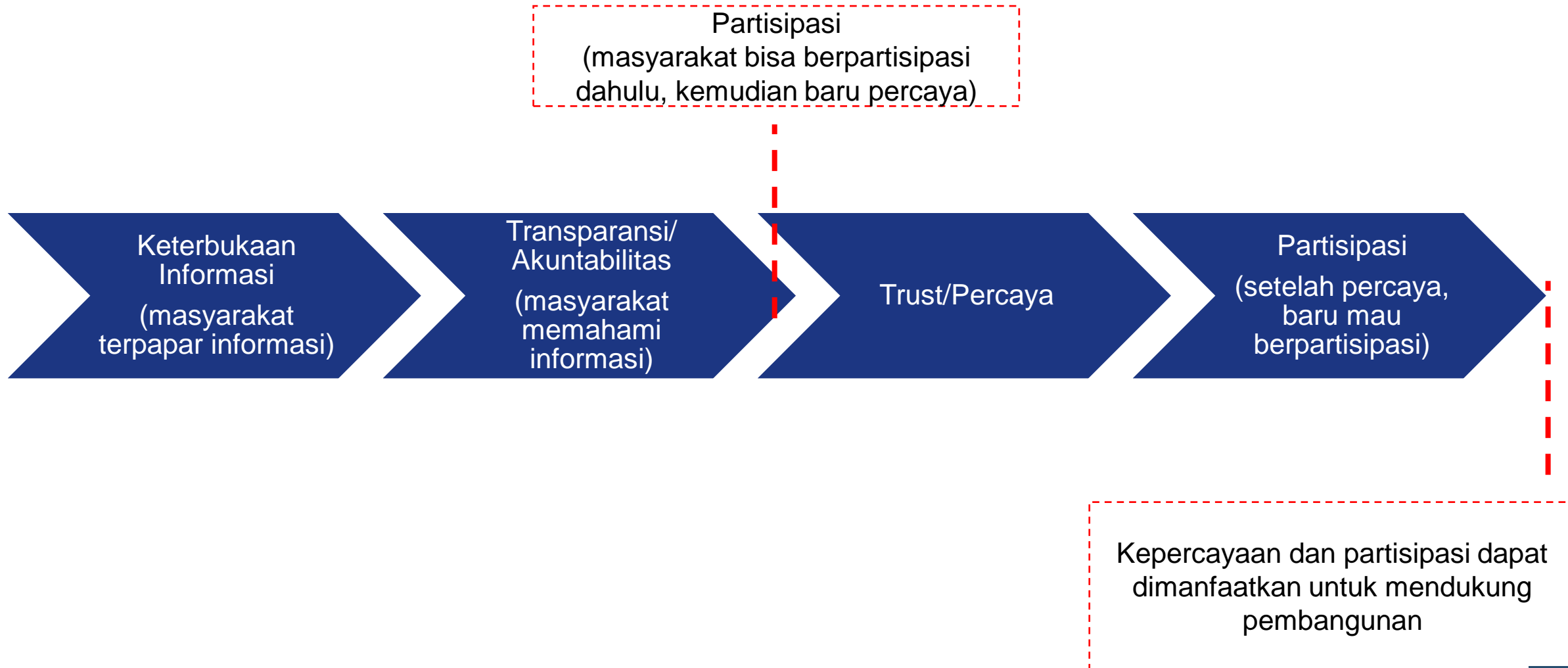
Mendorong **partisipasi publik yang bermakna** (*meaningful participation*) dalam pembangunan. **Keterbukaan informasi membuka akses masyarakat untuk terlibat** dalam proses pembuatan kebijakan dan untuk mengetahui substansi kebijakan → **perencanaan**

Mengoptimalkan **pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik** lain, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Berdampak pada perbaikan pelayanan publik → **pengendalian dan evaluasi**

Mendukung terwujudnya demokrasi substansial → *goals* RPJP 2025-2045 → jika hasil IKIP ditindaklanjuti untuk lakukan perbaikan.



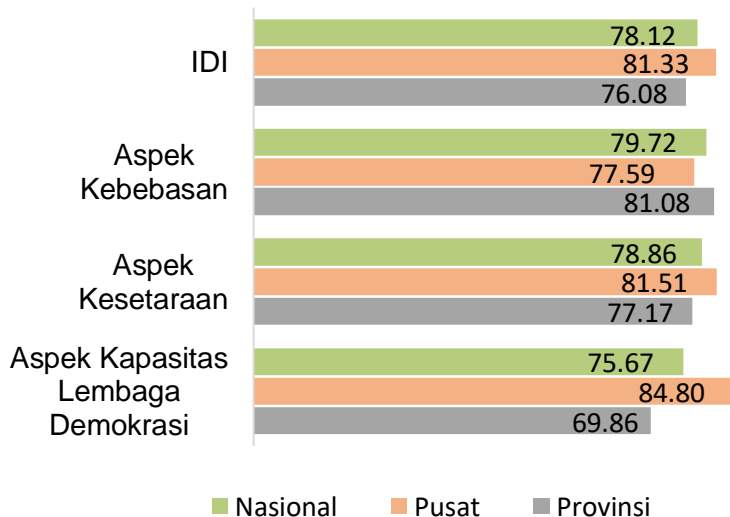
Manfaat Keterbukaan Informasi Publik



Indeks KIP dalam Demokrasi

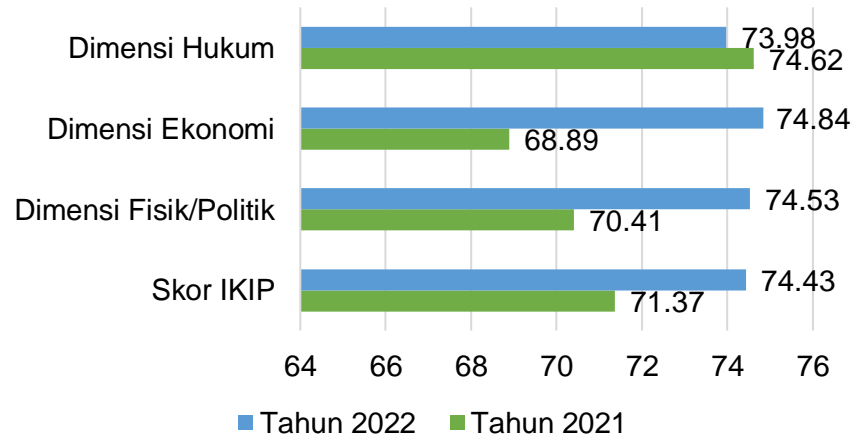
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Diukur sejak tahun 2010 (mengukur kualitas demokrasi t-1). Setelah lebih dari 10 tahun penghitungan, dilakukan revisi metodologi dan indikator pada IDI. Sejak tahun 2022, penghitungan IDI telah menggunakan metode baru yang mampu menggambarkan **kualitas perilaku demokrasi** Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat.



Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

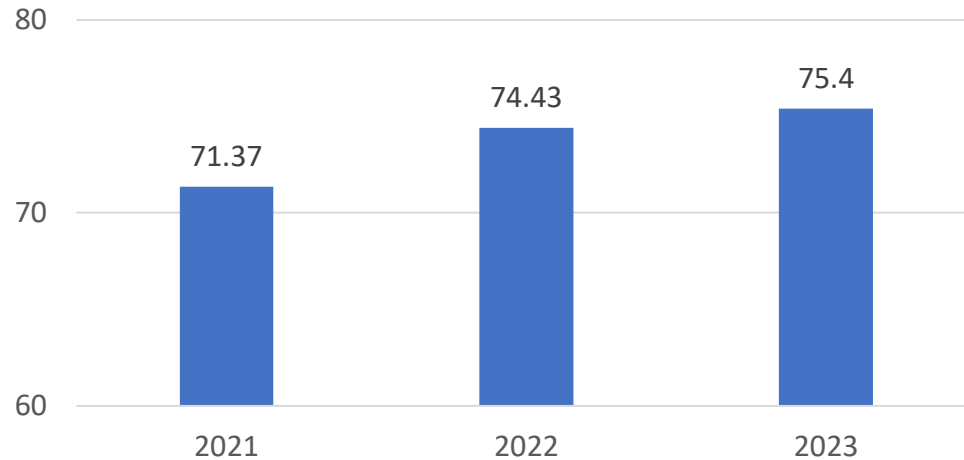
Diukur sejak 2021, untuk memotret **pelaksanaan keterbukaan informasi** di Pusat dan Daerah berdasarkan UU 14/2008 tentang KIP yaitu *obligation to tell, right to know, access to information*.



IDI metode baru menggunakan hasil Indeks KIP sebagai salah satu sumber data dalam penghitungan indeks, yaitu pada **indikator 13: “Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik”**

Tren Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik



| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Dimensi Fisik dan Politik | 70,41 | 74,53 | 75,73 |
| Dimensi Ekonomi | 68,89 | 74,84 | 74,83 |
| Dimensi Hukum | 74,62 | 73,98 | 75,22 |

Hasil IKIP 2023^{*)}

Kesimpulan

- Terjadi pergeseran tren: Dimensi Fisik dan Politik di posisi tertinggi.
- KIP 34 provinsi: 5 provinsi kategori baik; 24 provinsi kategori sedang menuju baik; 5 provinsi indeks rentan.
- IKIP Nasional di kategori sedang: belum maksimalnya implementasi UU 14/2008 => perlu penguatan regulasi di daerah.
- Sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat masih rendah.

Rekomendasi

- Semua daerah (provinsi sd desa) memiliki regulasi tentang KIP.
- PPID tidak hanya di Badan Publik Pemerintah, tetapi juga Badan Publik Ormas/LSM/Parpol.
- Dukungan anggaran oleh Pemda (prov/kab/kota) untuk KI dan PPID serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan literasi KIP kepada masyarakat.

^{*)}: Buku 2 IKIP 2023, KIP (2023)



RANCANGAN AKHIR RPJPN TAHUN 2025-2045

- Pemerintah Pusat**



Visi Indonesia Emas 2045



NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN



Agenda Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Visi

Pada aspek politik, **Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial**. Sistem politik berjalan dengan lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu memperkuat sistem presidensial. Budaya politik yang inklusif terwujud melalui kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Tantangan

Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti **teknis kepemiluan** dan **hubungan formal kelembagaan**. Hal ini berakibat pada terjadinya **politik uang**, kurangnya **kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi**, kurangnya **transparansi penggunaan dana publik**, belum optimalnya **sistem pemilu** dan **kemerdekaan pers**; serta kurangnya **kebebasan sipil**, meningkatnya **perilaku diskriminatif** dan **intoleransi**. Sementara itu, **kepercayaan dan partisipasi masyarakat** masih perlu terus ditingkatkan.



RPJPN 2025-2045 Bidang Politik dan Komunikasi

IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Tantangan

Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan **kemerdekaan pers**; serta kurangnya kebebasan sipil, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, **kepercayaan dan partisipasi masyarakat** masih perlu terus ditingkatkan.

Sasaran

Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak.

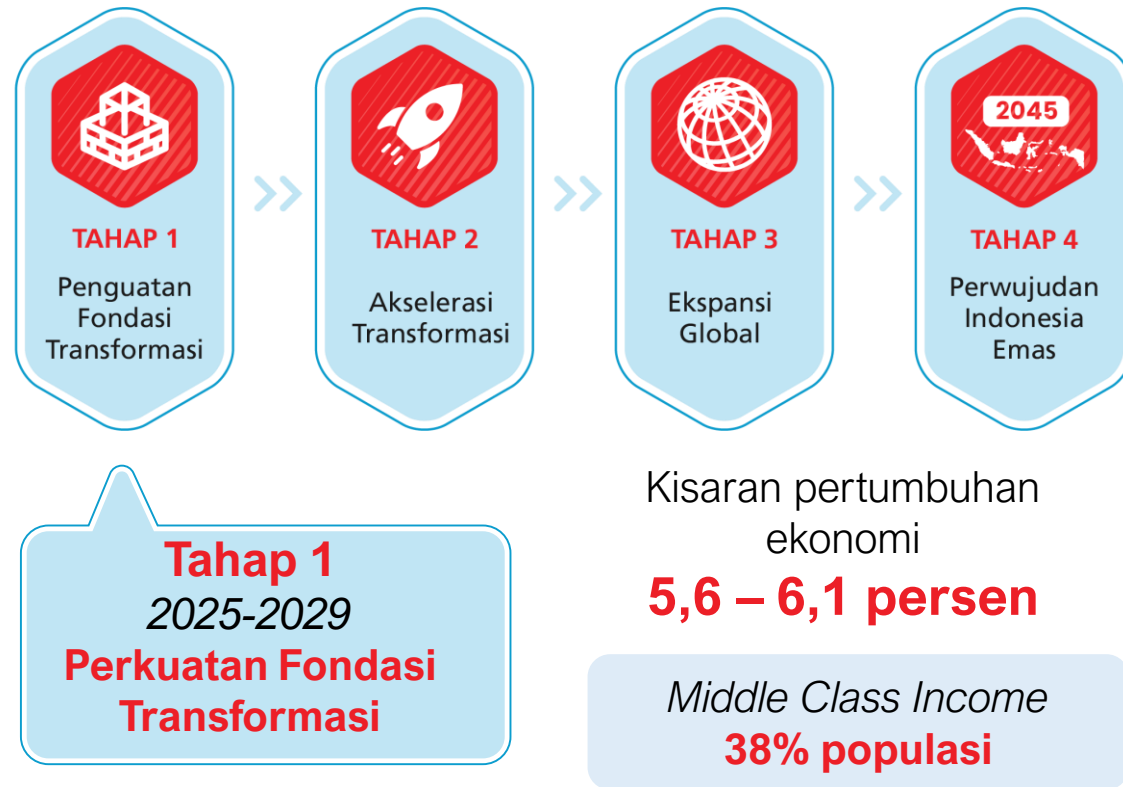
Arah Kebijakan

1. **Penguatan lembaga demokrasi** melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi UU Partai Politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta **media dan pers yang berkualitas**;
2. Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
3. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas;
5. **Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat**;
6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial



RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2025-2029

Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 Adalah Rancangan Teknokratik **Tahap Pertama Dari RPJPN 2025-2045**



Agenda Pembangunan

1. Transformasi Sosial:

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi:

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola:

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 disusun dengan pendekatan teknokratik oleh karena itu disusun mengacu RPJP 2025-2045
2. Saat ini sedang dilakukan **proses integrasi** Dokumen **RPJMN Teknokratik 2025-2029** dengan **Visi, Misi dan Program Presiden Terpilih**, sebagaimana amanat **UU No 25 Tahun 2004** bahwa RPJMN merupakan “*Dokumen Penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden*”

Agenda Pembangunan terkait Politik dan Komunikasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029



Transformasi Tata Kelola

Sasaran:

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif



Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Sasaran:

1. **Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional tangguh dan Demokrasi Substansial**
2. Stabilitas Ekonomi Makro
3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sasaran:

1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
3. Lingkungan Hidup Berkualitas
4. Mewujudkan Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan RPJMN Bidang Komunikasi





5 Agenda Pembangunan (AP)

01. Transformasi Sosial

02. Transformasi Ekonomi

03. Transformasi Tata Kelola

04. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi

05. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

IE- Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Program Pembangunan

Transformasi Kelembagaan dan tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional

Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan

Komunikasi Publik

Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi

Kegiatan Pembangunan

Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik

Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri

Indikasi RO terkait

1. Pelaksanaan Sistem Komunikasi Publik Nasional oleh Badan Publik
2. Pelatihan Bimtek Kepada Mitra Strategis Bidang Kominfo
3. Pelatihan Bimtek Kepada Aparatur Negara Bidang Komunikasi Publik
4. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah kepada Masyarakat
5. Penyusunan Regulasi Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional
6. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**
7. **Pemenuhan Badan Publik (Kementerian, Lembaga, LPNK, LNS, Pemprov, BUMN, PTN, Parpol) yang Informatif**
8. **Rekomendasi Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik**
9. **Penyusunan Revisi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
10. Pelatihan Kepada SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Serta Masyarakat yang Tersertifikasi dari Lembaga Berstandar ISO
11. Fasilitasi beasiswa S2 dan S3 Bidang Kominfo

1. Rekomendasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers
2. Pendampingan dan Verifikasi Perusahaan Pers
3. Wartawan yang mendapat Pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan
4. Jurnalis dan Saksi Ahli Pers yang Mendapat Bimtek
5. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat dan Saksi Ahli Pers
6. Penyusunan Regulasi Terkait Kepemilikan Media
7. Pemenuhan Lembaga Penyiaran yang Mematuhi Ketentuan Perundangan dan Peraturan yang Berlaku
8. Pemenuhan Kategori Program Televisi yang Berkualitas
9. Pelaksanaan Bimtek Kepada SDM Bidang Penyiaran
10. Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran
11. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat terhadap Isi Siaran
12. Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
13. Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)

Kebutuhan Regulasi RPJMN 2025-2029 Lingkup Komunikasi

Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

K/L Pemrakarsa

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, c.q Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
- Komisi Penyiaran Indonesia

Urgensi

- Telah diimplementasikan lebih dari 20 tahun, dan belum mengatur hal-hal fundamental
(al. Kelembagaan dan isu digitalisasi)
- Terdapat beberapa isu yang diusulkan untuk direvisi
(al. status dan kedudukan, masa bakti komisioner, tata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah, kewenangan kelembagaan, anggaran pembiayaan KPI Pusat dan KPI Daerah, struktur perizinan, dsb)
- Penyesuaian dengan UU Cipta Kerja untuk memperkuat demokratisasi penyiaran dan kualitas

Target Pembentukan

- Penyusunan Draf Rancangan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditargetkan selesai pada tahun 2025



K/L Pemrakarsa

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, c.q Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
- Komisi Informasi Pusat

Urgensi

- Memperluas cakupan informasi publik yang menjadi ciri penting negara demokrasi, dan sesuai amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Melakukan revisi atas beberapa hal penting, al. penguatan kelembagaan Komisi informasi Provinsi, PPID, dan menyikapi tantangan di era digitalisasi

Target Pembentukan

- Penyusunan Draf Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ditargetkan selesai pada periode 2025-2029.

Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penelaahan Kerangka Regulasi bersama Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas:
Penyusunan revisi UU Penyiaran telah masuk menjadi inisiatif DPR dan termasuk prolegnas prioritas yang akan diselesaikan oleh DPR pada tahun 2024



PRIORITAS NASIONAL RANCANGAN RKP TAHUN 2025

Rancangan Awal RKP 2025 Bidang Komunikasi AP Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Isu Strategis:

1. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan
2. Masih maraknya disinformasi, misinformasi, konten negatif, dan umpan klik (*clickbait*)
3. Penyebaran informasi publik masih belum merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Masih kurangnya pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik dan masyarakat
5. Perlunya peningkatan talenta digital untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi kunci transformasi ekonomi Indonesia
6. Belum optimalnya kebebasan pers dan kualitas konten penyiaran dan pers
7. Peran dan fungsi lembaga independen bidang komunikasi dan informasi yang belum kuat

Arah Kebijakan:

Komunikasi publik melalui:

1. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
2. Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri

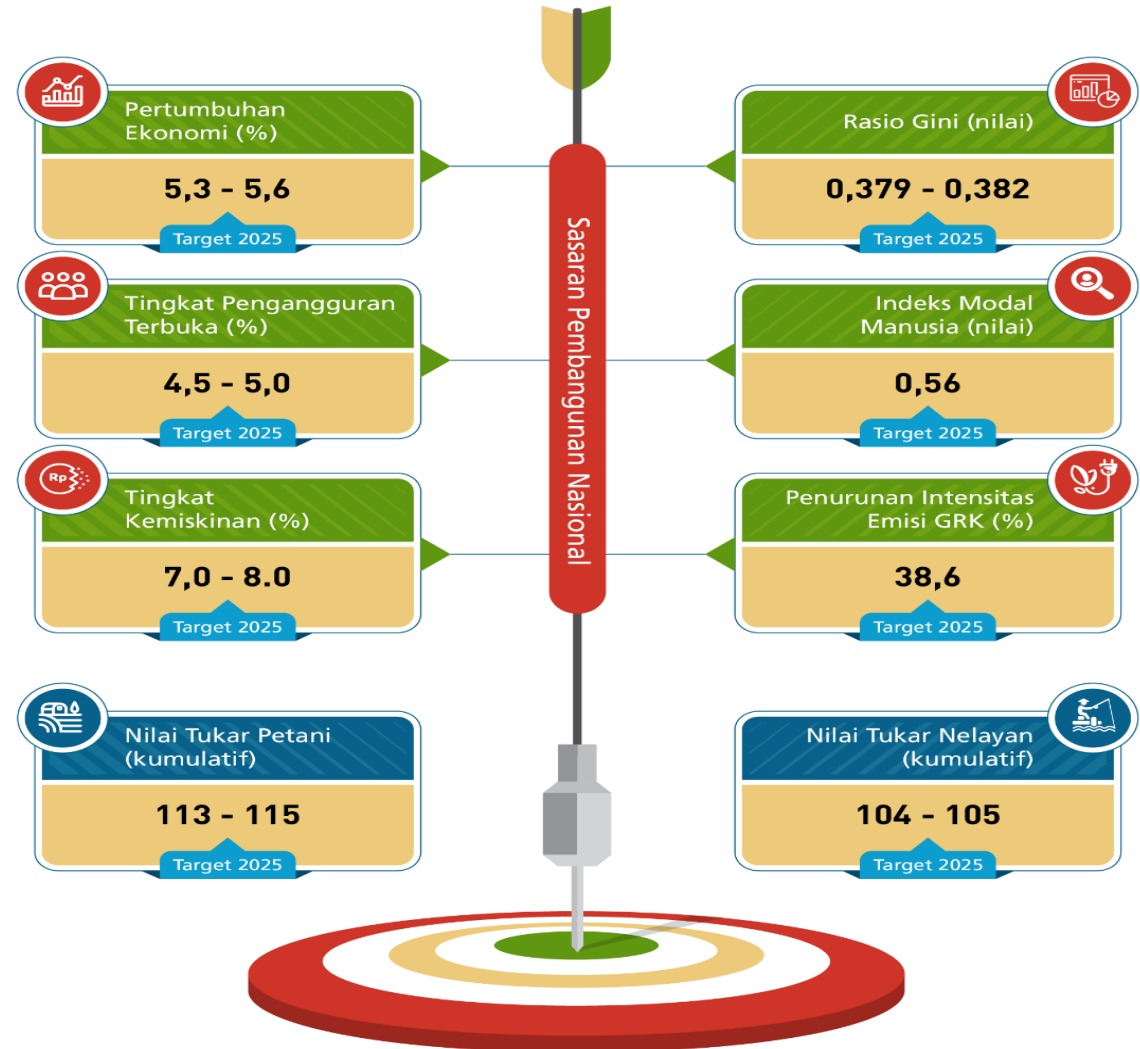
Strategi:

1. Penyusunan regulasi dan pelaksanaan Sistem Komunikasi Publik Nasional
2. Percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital
4. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik dan masyarakat
5. Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers
6. Peningkatan kapasitas, etika, dan kompetensi lembaga dan insan pers dan penyiaran
7. Menjamin perlindungan jurnalis atas berbagai bentuk ancaman dan kekerasan

Tema dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

Tema RKP 2025

**Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan**





Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ilustrasi Usulan Integrasi Struktur Visi - Misi Presiden Terpilih (Asta Cita 1) Dengan Ranc. Tekno RPJMN 2025-2029 Bidang Politik dan Komunikasi

Asta Cita 1

PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sasaran:

Indikator:

Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik,
dan Indeks HAM

45 Indikator RPJPN

Program
Pembangunan
Presiden
Terpilih

PP: Memperkokoh Ideologi Pancasila

Sasaran 1: Menguatnya Pancasila sebagai ideologi utama negara dan pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara

Indikator:

1. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek rumah tangga/komunitas/hubungan antarwarga;
2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Kelembagaan Negara; dan
3. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Regulasi/Kebijakan

PP: Penguatan Demokrasi

Sasaran: Terwujudnya demokrasi substansial melalui lembaga demokrasi yang kuat dan jaminan kebebasan serta kesetaraan

Indikator:

1. IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
2. IDI Aspek Kebebasan
3. IDI Aspek Kesetaraan

PP: Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik

Sasaran: Menguatnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan integrasi pengelolaan komunikasi publik

Indikator:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
2. Indeks Kemerdekaan Pers

PP: Kepemimpinan Nasional yang Berasaskan Pancasila, Demokrasi, HAM

Sasaran: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pengkaderan pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah

Indikator:

1. Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional

PP: Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM

Sasaran: Terwujudnya transformasi regulasi dan pelembagaan HAM serta akses pada keadilan di tingkat nasional dan daerah

Indikator:

1. Variabel Hak Sipil dan Politik Indeks HAM Indonesia
2. Variabel Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indeks HAM Indonesia

Cascading Indikator yang akan diturunkan pada level KP & ProP sesuai Proker Asta Cita

PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia



Arah Kebijakan

1. Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara
2. Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme
3. Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z
4. Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi
5. Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
6. Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas
7. Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
8. Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan
9. Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif
10. **Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik (T)**
11. Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri **(T)**
12. Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender **(T)**
13. Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku
14. Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya
15. Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya;
17. Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan **(T)**

Catatan: proses penyusunan Perpres RKP 2025

T= Teknokratik

Prioritas Nasional

01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Indikator PN

Indeks Aktualisasi Pancasila; Indeks Demokrasi Indonesia, **Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik**, dan Indeks HAM

Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat (320 ProKer – PraGib)

Program Pembangunan

Memperkokoh Ideologi Pancasila

Penguatan Demokrasi

Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik

Kepemimpinan Nasional yang Berasaskan Pancasila, Demokrasi, HAM

Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM

Indikator PP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan Indeks Kemerdekaan Pers

Kegiatan Pembangunan

Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik

Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri

Indikasi RO terkait

1. Pelaksanaan Sistem Komunikasi Publik Nasional oleh Badan Publik
2. Pelatihan Bimtek Kepada Mitra Strategis Bidang Kominfo
3. Pelatihan Bimtek Kepada Aparatur Negara Bidang Komunikasi Publik
4. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah kepada Masyarakat
5. Penyusunan Regulasi Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional
6. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**
7. **Pemenuhan Badan Publik (Kementerian, Lembaga, LPNK, LNS, Pemprov, BUMN, PTN, Parpol) yang Informatif**
8. **Rekomendasi Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik**
9. **Penyusunan Revisi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
10. Pelatihan Kepada SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Serta Masyarakat yang Tersertifikasi dari Lembaga Berstandar ISO
11. Fasilitasi beasiswa S2 dan S3 Bidang Kominfo

1. Rekomendasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers
2. Pendampingan dan Verifikasi Perusahaan Pers
3. Wartawan yang mendapat Pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan
4. Jurnalis dan Saksi Ahli Pers yang Mendapat Bimtek
5. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat dan Saksi Ahli Pers
6. Penyusunan Regulasi Terkait Kepemilikan Media
7. Pemenuhan Lembaga Penyiaran yang Mematuhi Ketentuan Perundangan dan Peraturan yang Berlaku
8. Pemenuhan Kategori Program Televisi yang Berkualitas
9. Pelaksanaan Bimtek Kepada SDM Bidang Penyiaran
10. Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran
11. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat terhadap Isi Siaran
12. Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
13. Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)

Catatan:
proses integrasi pada
penyusunan Perpres
RKP 2025



Struktur PN 1

PP Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (1)

EMBARGO

PP3: Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
Sasaran: Menguatnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan integrasi pengelolaan komunikasi publik
Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan Indeks Kemerdekaan Pers

ProP1: Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional

RO (Kemkominfo):

1. Bimtek Bidang Komunikasi Publik
2. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam
3. Peraturan Presiden Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Rekomendasi Hasil Survey Indeks PIKP
5. Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis
6. Diseminasi Informasi Bidang PMK
7. Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim
8. Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo

Catatan:
Proses integrasi pada
penyusunan Perpres RKP 2025

KP1: Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik

Sasaran: Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan informasi publik

Indikator:

1. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik (Tingkat Pusat)
2. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik (Tingkat Provinsi)
3. IKIP Dimensi Fisik dan Politik
4. IKIP Dimensi Ekonomi
5. IKIP Dimensi Hukum

ProP2: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

RO:

1. Rekomendasi hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Komisi Informasi Pusat)
2. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan (Komisi Informasi Pusat)
3. Badan Publik Pemerintah yang Informatif (Komisi Informasi Pusat)
4. Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kemkominfo dan Komisi Informasi Pusat)

ProP3: Peningkatan Kapasitas SDM yang Bertalenta Digital

RO (BPSDM Kemkominfo):

1. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Sertikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo
4. Digital Talent Scholarship
5. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Makassar dan Medan, serta BPSDMP Bandung, Manado, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin
6. Digital Talent Scholarship (DTS) di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar dan Medan, serta BPSDMP Bandung, Manado, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin
7. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK
8. Digital Talent Scholarship di BPPTIK
9. Digital Talent Scholarship di Pusdiklat
10. Pelatihan Kepemimpinan Digital



Struktur PN 1

PP Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (2)

EMBARGO

PP3: Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
Sasaran: Menguatnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan integrasi pengelolaan komunikasi publik
Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan Indeks Kemerdekaan Pers (IKPers)

KP2: Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri
Sasaran: Terwujudnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas
Indikator:
1. Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Fisik Politik
2. Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Ekonomi
3. Indeks Kemerdekaan Pers Lingkungan Hukum
4. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

ProP1: Peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Pers

RO (Dewan Pers):
1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers
2. Perusahaan Pers yang Diverifikasi
3. Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan
4. Rekomendasi Terkait Publisher Right

ProP2: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers

RO (Dewan Pers):
1. Wartawan Peserta Pelatihan dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan
2. Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers
3. Layanan Ahli Pers

ProP3: Penyehatan Media Arus Utama

RO (Komisi Penyiaran Indonesia):
1. Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia
2. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran
3. Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang Diawasi
4. Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio

Catatan:
proses integrasi pada penyusunan Perpres RKP 2025



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

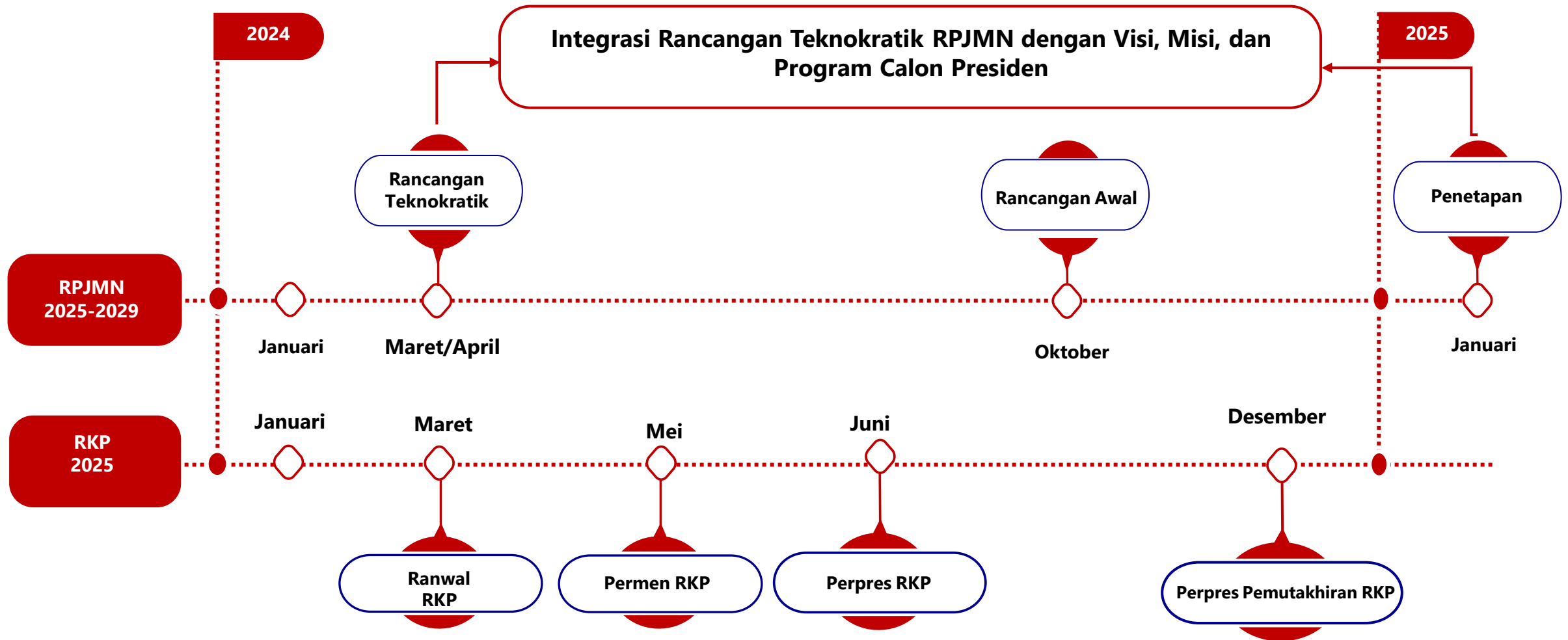
Terima Kasih





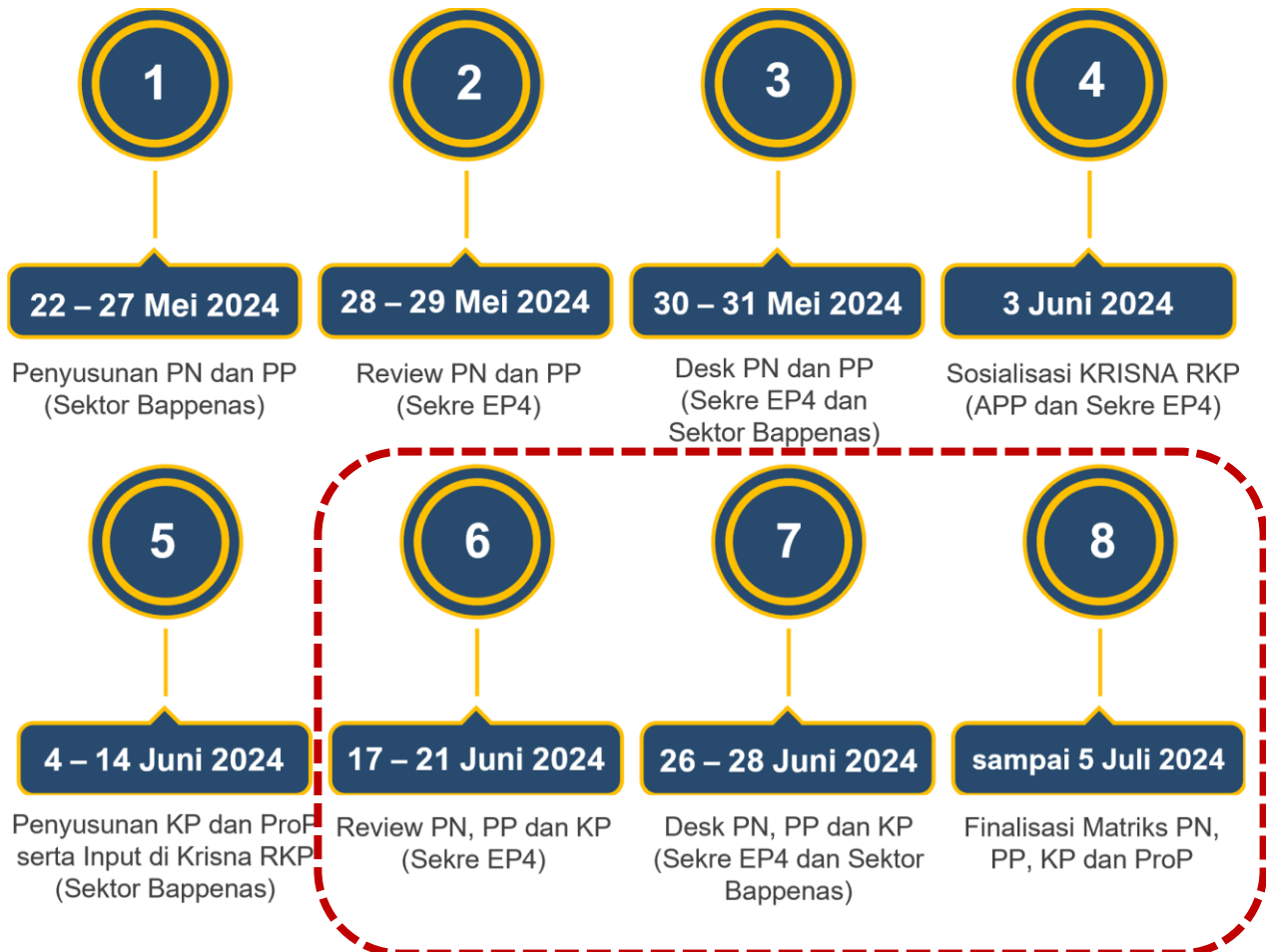
Lampiran

Integrasi Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 Dan RKP Tahun 2025



Timeline Penyusunan Perpres RKP Tahun 2025

A. Penyusunan Matriks Pembangunan RKP

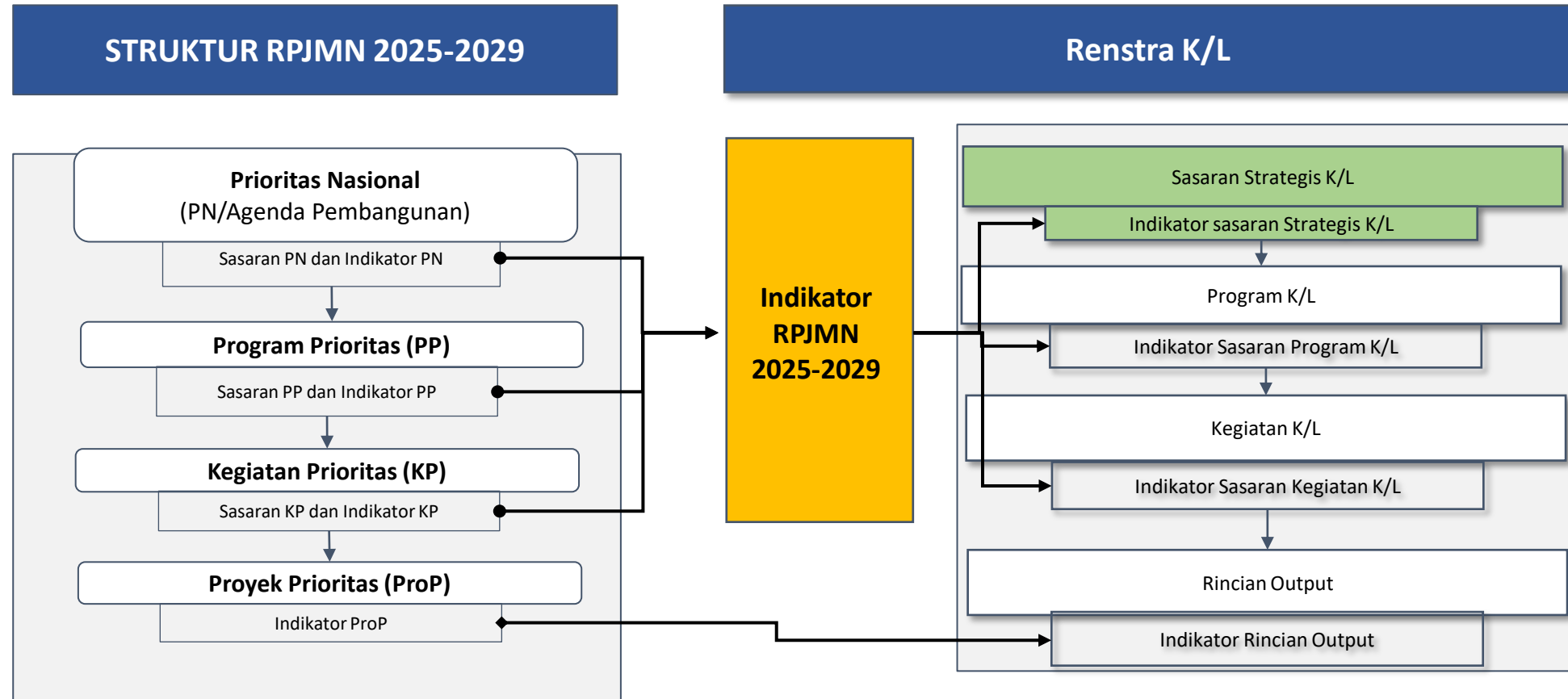


B. Penyusunan Narasi RKP



- Akan dilakukan pemutakhiran Narasi RKP setelah Paripurna DPR dan terbitnya Pagu Anggaran.
- Perpres RKP Tahun 2025 diundangkan pada akhir Juli.

Sinkronisasi Indikator RPJMN dengan Renstra K/L



Seluruh indikator pembangunan dalam RPJMN (PN/PP/KP) akan menjadi indikator pada Renstra K/L (indikator sasaran strategis/program/kegiatan)

*K/L yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan indikator dalam RPJMN dapat menyusun indikator Renstra K/L yang tetap mendukung indikator pada RPJMN